

**Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Revisi Anggaran, Kompetensi SDM, dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran**

**Jody Christofer<sup>1</sup>, Deni Darmawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Trisakti  
jodychristofer@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*One important indicator to assess the performance of the State Budget is by measuring the level of budget absorption in budget implementation. The amount of budget allocation that can be realized can reflect the functioning of the government such as driving economic growth, more even distribution, and maintaining economic stability. Given the importance of budget absorption in driving the nation's economy, it is necessary to conduct testing and analysis of factors that can affect budget absorption. This study aims to analyze the influence of budget planning, budget implementation, budget revision, human resource competency, and procurement of goods and services on budget absorption. The study uses purposive sampling method as the research method and employs multiple regression analysis model. The results show that budget revision has an influence on budget absorption. Meanwhile, budget planning, budget implementation, human resource competency, and procurement of goods and services do not have an influence on budget absorption.*

**Keywords:** budget planning, budget execution, budget revision, hr competence, procurement of goods and services, budget absorption

**ABSTRAK**

Saat ini satu indikator penting untuk mengetahui kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata, dan stabilitas perekonomian yang terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, perlu dilakukan pengujian dan analisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi penyerapan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, kompetensi SDM, dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai metode penelitian dan menggunakan model analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi anggaran memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi SDM, dan pengadaan barang dan jasa tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

**Kata kunci:** perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, kompetensi sdm, pengadaan barang dan jasa, penyerapan anggaran

**PENDAHULUAN**

Sejauh mana dana negara yang digunakan selama proses pelaksanaan anggaran merupakan indikator penting dari kinerja anggaran. Sejauh mana tugas-

tugas pemerintah seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pemerataan, dan menjaga stabilitas ekonomi, dapat tercermin dari besarnya pagu anggaran yang dapat direalisasikan. Mengingat peran penting penyerapan anggaran dalam mendorong perekonomian nasional, penting untuk mengevaluasi dan menganalisis variabel-variabel yang mungkin memengaruhinya. Penelitian ini akan menganalisis lima aspek yang diduga memengaruhi penggunaan anggaran: (1) perencanaan anggaran; (2) pelaksanaan anggaran; (3) revisi anggaran; (4) kompetensi SDM; dan (5) pengadaan barang dan jasa.

Salah satu tahapan yang sangat krusial dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah tahap perencanaan. Kegagalan untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran secara memadai akan menghambat infrastruktur daerah. Penganggaran dan perencanaan yang kurang baik menghasilkan penggunaan sumber daya yang tidak optimal (Fadhilatunnisa et al., 2021). Manajemen keuangan tidak lengkap tanpa langkah selanjutnya, eksekusi anggaran. Kendala dalam pelaksanaan anggaran seringkali menyebabkan suatu program/kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal atau rencana awal sehingga memengaruhi realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan (Purwati et al., 2021).

Manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien sangat penting untuk keberhasilan bisnis apa pun. Keberhasilan dalam mengelola anggaran sangat bergantung pada memiliki tim yang berpengalaman dan bermotivasi tinggi (Putra et al., 2020). Pertimbangan terakhir adalah perolehan bahan dan tenaga kerja. Salah satu peran entitas sektor publik adalah memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengadaan barang dan jasa. Sebagai aturan umum, anggaran diserap lebih lambat ketika unit kerja melakukan pembelian komoditas dan layanan yang buruk yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Koordinasi yang kurang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan faktor utama yang memperlambat penggunaan anggaran (Putra et al., 2020).

Beberapa penelitian telah menganalisis dampak perencanaan anggaran, pelaksanaan, revisi, kompetensi SDM, dan pengadaan barang dan jasa terhadap penggunaan anggaran, namun temuan mereka tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan (Puluala, 2021), (Wandari et al., 2021), (Ulandari et al., 2021), (Ferdinan et al., 2020) menjelaskan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap penyerapan anggaran; maka semakin baik perencanaan maka akan semakin baik pula penyerapan anggarannya. Namun, temuan penelitian (Harahap et al., 2020) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berdampak buruk pada penggunaan anggaran.

Setelah itu, pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran merupakan variabel selanjutnya yang akan dibandingkan pada percobaan kedua. Menurut studi (Harahap et al., 2020), eksekusi anggaran berdampak pada penggunaan anggaran. Jika dibandingkan dengan temuan (Puluala, 2021) dan (Ferdinan et al., 2020) yang menyatakan bahwa implementasi anggaran memiliki pengaruh yang kecil terhadap penyerapan anggaran, temuan ini sangat bertolak belakang. Temuan penelitian berbeda ketika memeriksa dampak kompetensi SDM pada penggunaan anggaran; meskipun (Puluala, 2021), (Wandari et al., 2021) dan

(Ulandari et al., 2021) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap pemanfaatan anggaran, (Harahap et al., 2020) menyatakan sebaliknya. Penelitian tentang dampak pembelian barang dan jasa menghasilkan temuan yang bertentangan. Sementara satu studi tidak menemukan dampak, yang lain menemukan dampak positif (Puluala, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penggunaan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini meliputi persiapan anggaran, pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, kemampuan sumber daya manusia, dan pengadaan produk dan layanan. Kajian ini akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mewujudkan transformasi digital, mendorong pertumbuhan ekosistem sektor perangkat TIK, memperluas koneksi broadband, serta memastikan keselamatan penerbangan dan pelayaran hanyalah beberapa hasil dari implementasi program prioritas Ditjen SDPPI. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang efektif diperlukan untuk memenuhi sasaran kinerja program prioritas.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, diketahui bahwa realisasi Belanja periode 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.019.969.266.051 atau 96,93% dari anggaran belanja sebesar Rp 1.052.237.070.000. Hal ini menunjukkan pada tahun 2021 pencapaian kinerja dilaksanakan dengan predikat baik oleh Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pentingnya pengukuran kinerja APBN guna pencapaian program dan target kinerja, serta keberhasilan atas tingkat realisasi/ penyerapan anggaran menjadi motivasi bagi peneliti untuk menganalisa faktor - faktor yang mendorong atau memengaruhi tercapainya penyerapan anggaran yang maksimal atau optimal.

Penelitian ini menggabungkan faktor-faktor yang memengaruhi penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Puluala (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. Sedangkan variabel Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. Sementara itu, Wandari et al (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Perencanaan anggaran (X1) secara individu/parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Kompetensi sumber daya manusia (X2) secara individu/parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Perencanaan anggaran (X1) dan kompetensi sumber daya manusia (X2) secara bersama-sama/simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Csr merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk turut serta dalam rangka pengembangan ekonomi dan diharapkan memperhatikan tanggung jawab sosialnya dengan berpatokan pada keseimbangan antara bentuk perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab dari sebuah perusahaan tidak hanya kegiatan ekonomi saja tetapi juga tanggung jawab akan lingkungan dan sosial perusahaan.

## TINJAUAN LITERATUR

### Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah tindakan menetapkan proyeksi arus kas masuk dan keluar serta strategi untuk mengamankan dana yang diperlukan untuk jangka waktu tertentu (Putra et al., 2020). Anggaran yang dipikirkan dengan baik adalah hasil dari proses multi-langkah yang dimulai dengan menentukan tujuan organisasi dan berlanjut melalui pemilihan strategi yang tepat, pengembangan sistem perencanaan yang komprehensif untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan semua tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan akhirnya realisasi tujuan tersebut (Fadhilatunnisa et al., 2021).

### Pelaksanaan Anggaran

Manajemen keuangan tidak lengkap tanpa langkah selanjutnya, eksekusi anggaran. Yang dimaksud dengan “implementasi” adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan keputusan dan strategi yang telah dibuat. Menyiapkan sumber daya yang sesuai, menentukan siapa yang akan menggunakannya, merancang rencana bagaimana anggaran akan digunakan, menentukan kapan dan di mana anggaran akan diterapkan—semua ini adalah bagian dari proses penerapan anggaran. Karena pendistribusian atau pengeluaran APBD sama dengan pelaksanaan anggaran, maka administrasi yang baik sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran (Salwah, 2019).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan, tiap-tiap Menteri/Pimpinan Lembaga adalah PA. Oleh karenanya, ia diberi tanggung jawab untuk mengelola bagian anggaran yang disediakan untuk menampung alokasi anggaran untuk membiayai kegiatannya dalam mewujudkan fungsi pemerintahan sesuai bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai PA, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menunjuk bawahannya sebagai KPA (KPA). KPA diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola bidang tugas tertentu secara bertanggung jawab melalui penciptaan mekanisme *check and balance*. Oleh karenanya, KPA dapat menunjuk bawahannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan dalam pelaksanaan anggaran yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran uang atas beban anggaran negara. Untuk mengimbangi pejabat dimaksud, PPK juga perlu menunjuk bawahan lainnya yang setara dalam tingkat jabatannya untuk diberi tugas melaksanakan pembayaran atas beban anggaran negara yang diakibatkan oleh keputusan dan/atau tindakan PPK dimaksud. Sebagai pelaksana pembayaran, pejabat dimaksud adalah Pejabat Penguji dan Penandatanganan Perintah Pembayaran. Kedua pejabat dimaksud melaksanakan tugas dalam mekanisme interaksi *check and balance* di bawah tanggung jawab KPA dimaksud. Di sisi lain, Menteri Keuangan merupakan Bendahara Umum Negara (BUN). Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Menteri Keuangan dapat menunjuk Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN). Kuasa BUN diberi tugas dan

kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu BUN secara bertanggung jawab melalui penciptaan mekanisme *check and balance* juga.

### **Revisi Anggaran**

Pengeluaran dari APBN tahun berjalan yang telah dikukuhkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dapat direvisi jika ada perubahan yang akan dilakukan pada rincian biaya tersebut. Karena perubahan yang diharuskan oleh amandemen, kegiatan jadwal pelaksanaan harus dijadwal ulang, dan tanggal pelaksanaan diundur (Nengsih et al., 2021). Ada kemungkinan bahwa anggaran yang dibuat setahun sebelumnya tidak dapat memenuhi kebutuhan Anda (Sukarta et al., 2017).

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi, sebagaimana didefinisikan oleh Davis dan Newstrom dalam (Enny, 2019: 30), adalah "sudut pandang kemampuan dan pengetahuan manusia, terutama kapasitas untuk memenuhi tuntutan yang beragam dalam bisnis dengan mengurangi biaya dan mengoptimalkan layanan kepada klien." Menurut Surya dalam (Enny, 2019: 30), kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki wirausaha tercermin dari kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (*start up*), melakukan sesuatu yang baru (*creative*), mencari peluang (*opportunity*), menanggung risiko (*risk bearing*), dan mengembangkan gagasan serta mengumpulkan sumber daya.

### **Pengadaan Barang dan Jasa**

Salah satu peran organisasi sektor publik adalah pengadaan produk dan layanan untuk menjawab kebutuhan masyarakat (Ramadhani & Setiawan, 2019). Sistem distribusi barang publik saat ini didukung oleh persaingan yang terbuka dan tidak terbatas, serta akses pasar yang luas. Selain itu, proses administrasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pemilihan peserta lelang, prosedur tender, dan pemberian kontrak harus terbuka untuk umum. Karena dolar pajak digunakan untuk mendanai pembelian ini, setiap kementerian dan wilayah administrasi memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan efisiensi dalam operasinya. Untuk meningkatkan transparansi dalam seluruh proses penjualan barang dan jasa, termasuk kontrak penjualan, baik sistem pemantauan internal maupun eksternal, serta media, harus tersedia untuk digunakan (Frankoe et al., 2021).

### **Penyerapan Anggaran**

Efisiensi di mana departemen dan lembaga pemerintah membelanjakan uang jatah mereka diukur dengan istilah "penyerapan anggaran". Sebagian besar evaluasi kinerja birokrasi terfokus pada berapa banyak uang yang dikeluarkan, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa uang yang dikeluarkan sebagian besar tidak penting. Namun, tujuan alokasi anggaran bukanlah penyerapan dana (Huda & Pandaya, 2019).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai

yang terlibat dalam proses penganggaran pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berjumlah 95 karyawan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh sampel penelitian ini sebanyak 40 orang. Adapun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner dengan skala likert. Sebelum melakukan proses analisis data, instrumen penelitian terlebih dahulu diujikan kevalidan dan kereliabelannya. Setelah dinyatakan valid dan reliabel, maka data dapat dilanjutkan ke proses analisis. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi dan uji hipotesis.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah pada suatu penelitian. Adapun pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dua kali yakni uji t (parsial) dan uji F (simultan) dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

No	Uji Hipotesis	Nilai Signifikan	Keterangan
<b>Uji t</b>			
H1	Perencanaan anggaran → penyerapan anggaran	0.325 > 0.05	Ditolak
H2	Pelaksanaan anggaran → penyerapan anggaran	0.075 > 0.05	Ditolak
H3	Revisi anggaran → penyerapan anggaran	0.045 < 0.05	Diterima
H4	Kompetensi SDM → penyerapan anggaran	0.331 > 0.05	Ditolak
H5	Pengadaan barang dan jasa → penyerapan anggaran	0.205 > 0.05	Ditolak
<b>Uji F</b>			
	Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, kompetensi SDM, pengadaan barang dan jasa → penyerapan anggaran	0.000 < 0.05	Diterima

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
2. Pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
3. Revisi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
4. Kompetensi anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.
5. Pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

6. Secara simultan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

#### **Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran**

Untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, perencanaan anggaran memperhitungkan masa kini dan masa lalu. Anggaran yang dipikirkan dengan baik adalah hasil dari proses multi-langkah yang dimulai dengan menentukan tujuan organisasi dan berlanjut melalui pemilihan strategi yang tepat, pengembangan sistem perencanaan yang komprehensif untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan semua tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan akhirnya realisasi tujuan tersebut (Fadhilatunnisa et al., 2021).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Tidak berpengaruhnya perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, hal ini dapat terjadi karena adanya komponen atau aspek dalam perencanaan anggaran yang belum dilakukan secara maksimal. Jika melihat hasil pengujian deskriptif, diketahui bahwa terdapat dua aspek yang memiliki nilai mean terendah. Aspek pertama adalah pertanyaan mengenai penyiapan rencana kegiatan atau kerja yang dilengkapi dengan data pendukung. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa responden menilai masih adanya rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan data pendukung atau responden menilai data pendukung yang ada belum lengkap atau belum memberikan informasi yang cukup untuk sebuah kegiatan.

Aspek kedua yang memiliki nilai mean terendah adalah pertanyaan mengenai masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang cukup waktu. Hal ini menggambarkan bahwa selama ini masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terjadi tidak efisien dan tidak cukup waktu, sehingga hal ini menyebabkan penyerapan anggaran belum optimal. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ningtyas, 2020) yang menjelaskan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

#### **Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran**

Manajemen keuangan tidak lengkap tanpa langkah selanjutnya, eksekusi anggaran. Implementasi anggaran mengacu pada tindakan yang dilakukan setelah anggaran dibuat untuk memberlakukan semua tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Studi ini tidak menemukan korelasi antara pelaksanaan anggaran dan penggunaan anggaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Hal ini dapat terjadi karena terdapat aspek-aspek penting dalam pelaksanaan anggaran yang belum dilaksanakan secara maksimal. Jika melihat jawaban responden pada hasil uji deskriptif, maka dapat diketahui terdapat beberapa aspek permasalahan terkait proses pelaksanaan anggaran yang perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.

Terdapat tiga aspek pertanyaan yang memiliki nilai mean yang tinggi, yakni 3.3 pada PLK1, 3.4 pada PLK3, dan 3.5 pada PLK5. Nilai mean yang tinggi ini menggambarkan bahwa responden setuju dengan pertanyaan bahwa pemenuhan kelengkapan dokumen sering tidak tepat waktu (PLK1), kegiatan sudah dilaksanakan tapi belum diganti melalui Uang Pengganti (PLK3), dan adanya addendum kontrak (PLK5). Secara keseluruhan pelaksanaan anggaran memiliki nilai mean yang rendah yakni 2.81 dimana hal ini menggambarkan bahwa perlu adanya evaluasi dan perbaikan atas proses pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan (Puluala, 2021) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Serta hasil yang serupa ditunjukkan oleh penelitian (Ferdinan et al., 2020) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

### **Pengaruh Revisi Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran**

Revisi anggaran adalah penyesuaian terhadap kekhususan anggaran yang telah disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan sesuai dengan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIPA). Penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan dan penundaan periode pelaksanaan merupakan hasil revisi yang perlu dilakukan (Nengsih et al., 2021). Temuan studi menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh apakah perubahan anggaran dilaksanakan secara bertahap atau tidak, dengan proses revisi yang lebih baik menyebabkan penyerapan anggaran lebih besar.

Hasil ini tergambar dari nilai mean pada RA2 yang menunjukkan nilai 4.0 di mana para responden setuju dengan pernyataan revisi anggaran terjadi karena adanya perubahan kegiatan atau target kerja. Revisi anggaran terjadi akibat adanya perubahan kegiatan atau target kerja pada tahun berjalan, dimana perubahan ini sebelumnya tidak atau belum masuk ke dalam perencanaan anggaran pada tahun penyusunan.

Dengan adanya perubahan kegiatan atau target kerja pada tahun berjalan, revisi atas DIPA sebagai acuan belanja setiap satuan kerja akan dilakukan dan memengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika harus mengawasi proses revisi dengan seksama dan memastikan bahwa anggaran yang telah direvisi digunakan dengan tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan (Nengsih et al., 2021) yang menjelaskan bahwa revisi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

### **Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Penyerapan Anggaran**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Jika melihat hasil pengujian deskriptif, kompetensi SDM secara keseluruhan memiliki nilai mean yang rendah yakni 3.67 dimana hal ini menjadi gambaran perlu adanya peningkatan kompetensi SDM.

Tidak signifikannya kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran menjelaskan bahwa tingkat penyerapan anggaran pada objek penelitian tidak bergantung pada kompetensi SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Alimuddin, 2018) menjelaskan bahwa pendidikan dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Jika melihat profil responden diketahui bahwa masih terdapat beberapa responden yang memiliki latar belakang pendidikan SMA dan Diploma. Asumsinya dengan semakin tinggi pendidikan maka proses implementasi pengetahuan akan lebih mudah dalam meningkatkan keterampilan untuk meningkatkan penyerapan anggaran.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh (Ramadhani & Setiawan, 2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Alimuddin, 2018) yang menjelaskan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

#### **Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran**

Sistem distribusi barang publik saat ini didukung oleh persaingan yang terbuka dan tidak terbatas, serta akses pasar yang luas. Selain itu, proses administrasi yang meliputi namun tidak terbatas pada pemilihan peserta lelang, prosedur tender, dan pemberian kontrak harus terbuka untuk umum. Karena pemungutan pajak dan pembayaran PNPB mendanai operasional pemerintah, pemerintah harus menentukan metode mana yang paling efektif untuk setiap kementerian dan lembaga. Untuk meningkatkan transparansi dalam seluruh proses penjualan barang dan jasa, termasuk kontrak penjualan, baik sistem pemantauan internal maupun eksternal, serta media, harus tersedia untuk digunakan. (Frankoe et al., 2021)

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Jika melihat jawaban responden pada hasil uji deskriptif, maka dapat diketahui bahwa tidak ada permasalahan yang serius terkait proses pengadaan barang dan jasa, hanya pada kode item PBJ3 memiliki nilai mean yang rendah yakni proses administrasi tidak menjadi penghalang jalannya pengadaan barang dan jasa. Nilai mean ini menggambarkan kondisi sebaliknya dimana responden menilai bahwa masih ditemui beberapa proses administrasi yang mengalami masalah, meskipun hal tersebut tidak signifikan.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Delia et al., 2021), yang menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Serta penelitian yang dilakukan oleh (Puluala, 2021) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

#### **KESIMPULAN**

Secara parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi anggaran dan pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Namun revisi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Adapun jika secara simultan perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, revisi anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian ini dilakukan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga hasil penelitiannya hanya menggambarkan kondisi penyerapan anggaran pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, di mana hasil penelitian ini belum memenuhi prinsip generalisasi, sehingga penelitian di masa yang akan datang dapat memperluas sampel atau melakukan perbandingan sampel dengan satuan kerja pada kementerian lainnya. Diketahui bahwa revisi anggaran adalah satu-satunya variabel yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sehingga dengan demikian objek penelitian harus dengan seksama mengawasi jalannya revisi anggaran, sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai dengan optimal. Diketahui dari lima variabel bebas yang diuji hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, maka peneliti memberikan saran kepada peneliti di masa yang akan datang untuk menambah atau menggunakan variabel lainnya yang dapat memengaruhi penyerapan anggaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alimuddin. (2018). Analisis Penyerapan Anggaran di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis Makassar. In Universitas Hasanuddin Makassar.
- Delia, T., Djaddang, S., Suratno., & Mulyadi, J. (2021). Analisis Determinasi Penyerapan Anggaran dengan Perencanaan Anggaran Dan politik Anggaran sebagai Pemoderasi. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 116-131.
- Enny, M. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Ubhara Manajemen Press.
- Fadhilatunnisa, A., Suwondo, S., & Novianty, I. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Penyerapan Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *The Effect of Budget Planning and Budget Absorption on Performance of Government Agencies (A Survey In Reg*, 1(3), 577-586.
- Ferdinan., Isnurhadi., Widiyanti, M., & Adam, M. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia. *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 17(2), 117-134.
- Frankoe, A., Kamaludin, K., & Fadli, F. (2021). Pengaruh Perencanaan Penganggaran dan e-Procurement terhadap Penyerapan Anggaran. *The Manager Review*, 28-55.
- Harahap, S. A. S., Taufik, T., & Nurazlina. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada Opd Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 1-10.
- Huda, A. N., & Pandaya, P. (2019). Determinan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 164-178.

- Nengsih, Y. R., Ningsih, A., Indriani, J. D., & Kuliman. (2021). ... Anggaran, Revisi Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Opd Pemerintah Kabupaten Lima .... Profita: Akuntansi dan ..., 2(November), 143-149.
- Ningtyas, W. P. M. (2020). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa, dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Belanja (Studi Empiris di Opd Kabupaten Magelang). In Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Puluala, M. G. (2021). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga). 1(1), 1-9.
- Purwati, I., Arisyahidin, & Talkah, A. (2021). Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran di Kabupaten Kediri. Otonomi Edisi Oktober, 21(2).
- Putra, F. B., Kennedy, & Zarefar, A. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administrasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran (Studi pada Opd Provinsi Riau). Jom Feb, Volume 7 Edisi 2 (Juli- Desember 2020), 7(2), 1-14.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada Opd Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 710-726.
- Salwah, A. (2019). Pekaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 164-182.
- Sukarta, I. W., Badera, I. D. N., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Pengaruh Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen dan Revisi Anggaran pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Universitas Udayana. *e-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 11, 3917.
- Ulandari, V., Akram, & Santoso, B. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Administrasi sebagai Pemoderasi. *e-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1577.
- Wandari, R. S., Gunawan, A., & Nugraha, D. S. (2021). Pengaruh Perencanaan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran (Survei pada Skpd di Wilayah Pemerintah Kota Cimahi) The Effect of Planning and Human Resource Competence on The Budget Absorption (Survey on The Regional Gove. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 551-563.